

KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT STUDI KASUS KELOMPOK TANI TARUNA TANI DESA KARYASARI KECAMATAN LEUWILIANG BOGOR

Raka Aditya Wibisono^{1*}, Hariadi Kartodihardjo¹

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680.

*Email : raka.wibisono95@gmail.com

RINGKASAN

Jejaring Kelembagaan menentukan nilai-nilai dan kebiasaan dalam sebuah kelompok agar menjadi aturan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dan efektifitasnya dalam menentukan pengelolaan hutan rakyat pada kelompok Taruna Tani. Data dikumpulkan dengan metode wawancara *focused interview* dan studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelembagaan dalam kelompok Taruna Tani mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Secara struktural, kelompok Taruna Tani memiliki struktur organisasi yang lengkap. Aturan tertulis (formal) dibuat berlandaskan dari kebiasaan dan nilai-nilai yang telah dijalani masyarakat sedangkan aturan informal berupa larangan-larangan dan kesepakatan masyarakat Desa Karyasari dalam mengelola hutan rakyat. Salah satu kendala yang dialami dalam kelompok Taruna Tani yaitu tidak adanya pelaksanaan tugas dari seksi-seksi yang ada dan tidak adanya regenerasi kepengurusan dalam kelompok, hal tersebut perlu dilakukan agar pengelolaan hutan rakyat oleh kelompok tani dapat berjalan efektif.

Kata kunci: hutan rakyat, kelembagaan, kelompok tani

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Pengelolaan hutan rakyat di Desa Karyasari berkembang sejak terbentuknya kelompok tani, dengan adanya kelompok tani sebagai wadah dalam pemberian bantuan seperti bantuan bibit dan peralatan pertanian.
- ◆ Pemimpin berperan dalam memberikan instruksi, motivasi, informasi dalam mencapai tujuan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi individu ataupun kelompok.
- ◆ Kelompok Taruna Tani memiliki aturan formal dan informal yang menjadi pedoman anggotanya untuk bertindak yang secara efektif dipatuhi oleh anggota. Kelompok Taruna Tani memiliki struktur organisasi yang jelas.
- ◆ Kelompok Taruna Tani memiliki kekurangan, yaitu belum adanya regenerasi organisasi, kurangnya kejelasan pelaksanaan terkait tugas pokok dan fungsi dari seksi-seksi yang ada dan pemasaran kayu yang dijual secara individu yang membuat harga kayu yang dibeli tidak memiliki harga yang jelas, sehingga

kelembagaan yang ada pada kelompok Taruna Tani belum dapat dikatakan efektif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Kelompok Taruna Tani memiliki struktur organisasi yang lengkap tetapi dalam pelaksanaannya pembentukan struktur organisasi tersebut seperti hanya formalitas untuk terbentuknya sebuah kelompok tani, sehingga perlu adanya pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap seksi agar tercipta pengelolaan hutan dengan alur yang terstruktur.
- ◆ Kelompok tani membutuhkan cara untuk mengatasi hama ulat uter yang ada di lahan masyarakat, sehingga masyarakat perlu adanya penyuluhan terkait pemeliharaan tanaman khususnya pembersihan hama pada lahan hutan rakyat mereka.

I. PENDAHULUAN

Hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh di lahan milik, dikelola dan dikuasai oleh rakyat (Djuwadi 2002). Masyarakat yang berada di dalam hutan rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan lahan untuk kepentingan sosial maupun ekonomi serta menjaga dan melestarikan hutan yang mereka kelola. Pengelolaan hutan rakyat pada umumnya bersifat mandiri. Menurut Awang *et al.* (2007) pengelolaan hutan rakyat masih berbasis pada tingkat keluarga karena setiap keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah. Menurut Widiyanti (2009), segala aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berasal dari pemilik

lahan atau keluarga yang mengusahakan hutan rakyat tersebut.

Untuk menjamin keberhasilan dalam mengelola hutan rakyat perlu adanya penguatan kelembagaan dalam masing-masing anggota kelompok tani, sehingga terbentuk aturan-aturan internal mengenai sistem pengelolaan hutan rakyat baik itu dalam hal penanaman, penebangan, pemasaran dan lain – lain yang berkaitan dengan kelancaran subsistem pengelolaan hutan rakyat yang disepakati oleh seluruh anggotanya (Hindra 2006). Kelembagaan menurut Uphoff (1986) dalam Ohorella *et al.* (2011) adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang biasa berlaku dan menjadi nilai bersama untuk melayani tujuan kolektif. Pada pengelolaan hutan rakyat, kelembagaan yang dimaksud mencakup aspek struktural atau keorganisasian dan aturan main. Selaras dengan hal itu, dalam tulisannya Syahyuti (2006) menulis suatu kelembagaan adalah suatu pemanfaatan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok orang. Terdapat dua aspek dalam kelembagaan yaitu aspek kultural (aspek kelembagaan) dan aspek struktural (aspek keorganisasian). Aspek kultural terdiri dari hal-hal yang lebih abstrak yang menentukan “jiwa” suatu kelembagaan yaitu nilai, norma, dan aturan. Sementara aspek struktural berupa sesuatu yang lebih visual dan statis yaitu struktur, penetapan peran, tujuan, keanggotaan, dan lain-lain (Syahyuti 2006).

Kelompok tani Taruna Tani memiliki aturan internal dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelembagaan pengelolaan hutan rakyat dan efektifitasnya dalam menentukan pengelolaan hutan rakyat pada kelompok Taruna Tani Desa Karyasari sehingga dapat memberikan gambaran mengenai sistem pengelolaan dan

kelembagaan hutan rakyat.

II. SITUASI TERKINI

Kelembagaan dalam Hutan Rakyat di Desa Karyasari

Desa Karyasari memiliki tiga kelompok tani yaitu kelompok tani Taruna Tani, Manggis, dan Rimba Sejahtera. Pada awal tahun 2004, masyarakat Desa Karyasari khususnya RW 06 memiliki keinginan untuk membuat sebuah kelompok tani dengan tujuan untuk mengembangkan lahan hutan rakyat yang mereka punya. Masyarakat memiliki dua cara dalam memperoleh bibit sebelum adanya kelompok tani yaitu dengan cara alami dan membeli. Bibit yang diperoleh secara alami tidak semuanya dapat ditanam dan tumbuh secara baik sehingga masyarakat mulai kesusahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui pengelolaan lahan yang umumnya ditanami kayu sengon.

Pada tahun yang sama, Bapak Mansur sebagai penggagas kelompok Taruna Tani dan masyarakat Desa Karyasari melakukan pertemuan dengan masyarakat RW 06 dan tokoh masyarakat seperti kepala desa untuk membuat sebuah wadah yang dapat dijadikan pengembangan dalam pengelolaan hutan rakyat dan sebagai tempat berkumpulnya petani untuk mengembangkan ekonomi. Pada bulan September tahun 2004 terbitlah Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 41/11/VIII/2004 tentang Penguatan dan Pengesahan Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Setelah kelompok tani terbentuk, terdapat beberapa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Tahun 2012 terjadi perubahan kepengurusan

dan struktur kelompok tani. Perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada kelompok tani. Perubahan yang terjadi adalah pergantian sekretaris dan penghapusan 3 seksi yaitu seksi pertanian, seksi perkebunan, dan seksi perikanan. Hal ini dilakukan karena anggota kelompok tani mayoritas tidak tertarik pada seksi tersebut sehingga seksi yang ada menjadi kurang aktif dan diganti dengan 2 seksi yaitu seksi pembibitan dan seksi kebun rakyat. Pengelolaan lahan hutan rakyat oleh kelompok tani berfokus pada pertanian dan kehutanan. Tahun 2013, kelompok Taruna Tani mendapatkan prestasi yaitu menjadi juara 2 dari lomba kelompok tani kelas lanjut tingkat Kabupaten Bogor yang dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Bogor.

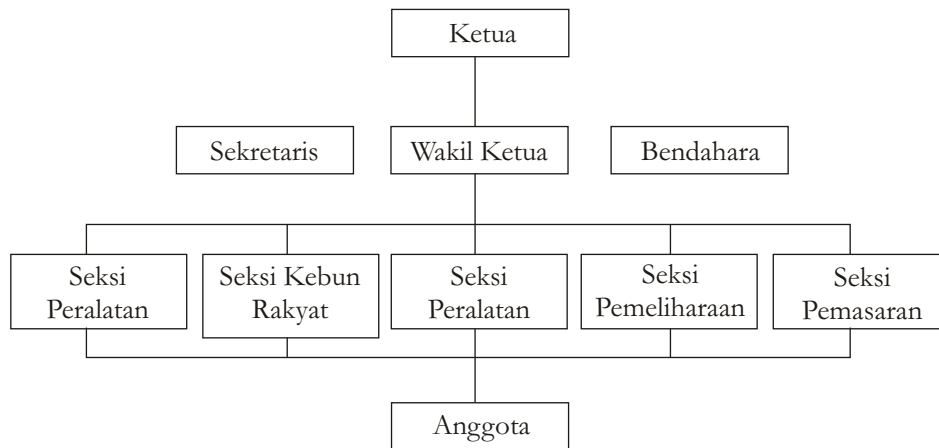
Lembaga akan tetap eksis sepanjang masih mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya (Widiyanti 2009). Kelompok Taruna Tani memiliki tujuan yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan pengurusnya dengan meningkatkan penghasilan dan memberi perhatian khusus dalam pengelolaan hutan rakyat. Tujuan kelompok Taruna Tani tertuang pada Anggaran Dasar (AD) Kelompok Tani Taruna Tani, yaitu: 1) Kelompok bermaksud mendorong mengangkat ekonomi masyarakat desa, 2) Kelompok bermaksud memfasilitasi anggota dalam kebutuhan sarana produksi dan permodalan, dan 3) Kelompok dibentuk sebagai tempat belajar anggota, tempat produksi dan tempat kerjasama.

Struktur Organisasi Kelompok Tani Taruna Tani

Pengurus kelompok Taruna Tani dipilih berdasarkan kesepakatan dan persetujuan anggota yang terpilih dan berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Kelompok Taruna Tani memiliki struktur kelembagaan yang lengkap (Gambar 1), namun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing divisi atau seksi tidak terlihat dengan jelas.

Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan anggota terhadap susunan pengurus kelembagaan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan lahan di hutan rakyat.



Gambar 1 Struktur kelompok tani Taruna Tani

Pergantian pemimpin dan kepengurusan secara teratur memiliki peran penting dalam penyempurnaan kelembagaan serta mereduksi sistem yang kurang baik (Arief 2016). Kelompok Taruna Tani tidak memiliki regenerasi yang tetap. Ketua kelompok tidak berubah dari kelompok tani terbentuk pada tahun 2004. Hal ini terjadi karena anggota yang lain merasa tidak mampu untuk menggantikan ketua yang sekarang. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada kelompok Taruna Tani menggunakan musyawarah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya rapat anggota yang dilakukan untuk mencari hasil yang disepakati semua anggota yang hadir. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok, hal ini tertuang dalam Anggaran Dasar Kelompok Taruna Tani. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan biasanya meliputi kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh kelompok tani, distribusi bantuan, dan masalah dalam hal pengelolaan lahan. Pada tahun 2017 dilakukan dua kali pertemuan kelompok tani yaitu di bulan Januari dan Mei. Hal yang dibicarakan adalah masalah hama dan penyakit yang menyerang tanaman mereka seperti ulat uter, lalu membicarakan program pembuatan bendungan air yang dilakukan pada bulan Oktober 2017. Hasil wawancara dengan seluruh responden menyatakan di dalam pertemuan kelompok tani, semua orang baik pengurus maupun anggota memiliki hak suara yang sama dan komunikasi dalam kelompok terjalin dengan baik.

Keanggotaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok Taruna Tani pola perekrutan anggota yang dilakukan bersifat bebas atau sukarela. Sampai pada tahun 2017 kelompok Taruna Tani beranggotakan 42 orang yang didalamnya terdapat 4 pengurus dan 38 anggota. Anggota kelompok

Taruna Tani tidak hanya bekerja menjadi petani hutan rakyat saja, tetapi ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan seperti beternak kambing, berjualan sayur, dan membuka warung di rumah. Menurut seluruh responden, kelompok tani tidak memiliki jadwal yang rutin. Kelompok tani akan mengadakan pertemuan apabila terdapat bantuan atau kerjasama yang dilakukan dari pihak eksternal dengan kelompok tani.

Kepemimpinan

Hasil wawancara dengan anggota kelompok tani menunjukkan landasan penetapan yang dilakukan dalam memilih pemimpin kelompok tani yaitu keprofesionalan dan pengalaman yang telah dimiliki dalam mengelola kelompok tani. Komponen kepemimpinan yang melekat pada diri seseorang antara lain integritas personal yang tinggi, visi kedepan yang jelas dan implementatif, mampu memberi inspirasi dan mengarahkan anggotanya, interaktif dengan kebutuhan anggota, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan konflik yang terjadi dimasyarakat (Pranaji 2003).

Pengurus berperan memberikan instruksi, informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan motivasi dalam mencapai tujuan bersama serta memberikan solusi jika terdapat permasalahan. Selain itu pengurus juga berperan dalam memfasilitasi terjadinya interaksi dengan komunikasi dalam kelompok agar terjalin pertukaran informasi.

III. METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Karyasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Desa

Karyasari memiliki luas wilayah ± 658.20 ha. Desa Karyasari memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut sebesar 300-750 mdpl, memiliki curah hujan sebesar 300-450 mm dan suhu rata-rata sebesar 18-23°C. Desa Karyasari memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pabangbon, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puraseda, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pamijahan, dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karacak. Jumlah rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) yaitu 10 dan 37 yang memiliki kepala desa sebanyak 6 orang. Penduduk Desa Karyasari sampai tahun 2015 berjumlah 8307 orang dengan jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 4286 dan 4021 orang.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer yang didapatkan melalui wawancara *focused interview* (Rianse 2009) dengan petani hutan rakyat dan pengurus kelompok tani mengenai sistem pengelolaan hutan rakyat dan kelembagaan. Untuk anggota kelompok tani, data wawancara diambil sebanyak 26 orang dan pengurus sebanyak 4 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Data sekunder didapatkan dari instansi atau lembaga yang terkait seperti kelompok tani hutan rakyat, dinas, dan instansi terkait lainnya yang meliputi data kondisi umum dan sejarah lokasi penelitian, aturan-aturan tertulis mengenai sistem pengelolaan hutan dan struktur kelembagaan.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif (Arief 2016). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui permasalahan, cara yang berlaku, pandangan, dan proses dalam

masyarakat. Analisis deskriptif untuk menjelaskan sistem pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh petani, serta menjelaskan kelembagaan dari aspek struktural/keorganisasian dan aspek kultural berupa aturan main dan penegakan aturan. Data disusun berdasarkan golongan dan kategori. Metode deskriptif ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah seluruh responden dikali 100 persen, seperti dikemukakan Sudjana (2001) adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{F}{N} \times 100\%$$

f = frekuensi jawaban responden

N = Jumlah seluruh responden

Analisis deskriptif menjelaskan tentang hasil wawancara dengan responden yang sifatnya dapat mendeskripsikan secara utuh gambaran yang didapatkan dari hasil wawancara oleh responden.

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI

Kelembagaan sebagai Aturan Main

Aturan pengelolaan hutan rakyat dituangkan dalam aturan tertulis berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Tani Taruna Tani. Aturan dari AD dijadikan sebagai acuan untuk mengatur kegiatan pengelolaan hutan rakyat dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola hutannya yang mengacu pada teknik silvikultur yang baik. Hasil wawancara dengan ketua kelompok Taruna Tani menjelaskan bahwa aturan dibuat berlandaskan pada norma yang

berkembang di masyarakat dan menjadi cara, kebiasaan dan adat istiadat dalam mengelola hutannya. Terdapat aturan lokal yang melarang masyarakat untuk membakar hutan, hal tersebut dapat dilihat dari pembersihan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dengan dibakar tetapi dengan mengarit rumput dan memotongnya untuk dijadikan pakan ternak atau dibuang. Menurut seluruh responden, masyarakat Desa Karyasari memiliki anjuran turun temurun untuk tidak menjual lahan yang mereka kelola, sebisa mungkin lahan yang mereka punya di olah agar dapat dikelola dan berguna untuk kebutuhan ekonomi mereka. Hal ini membuat masyarakat Desa Karyasari untuk tetap menjaga dan melestarikan lahan yang ada di hutan rakyat.

Dalam melakukan pengawasan lahan, anggota kelompok saling membantu dan bekerja sama dalam menjaga lahan. Selain itu anggota kelompok juga saling membantu dalam melakukan pengelolaan hutan seperti melakukan persiapan lahan sebelum ditanam, anggota kelompok terkadang melakukannya dengan cara saling bergantian sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar dibandingkan dengan mereka melakukannya sendiri.

Efektifitas Kelembagaan

Efektifitas kelembagaan perlu dinilai untuk mengetahui sejauh mana kelembagaan tersebut bekerja. Keefektifan kelembagaan diukur dari tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan-aturan (Ohorella *et al.* 2011). Tingkat kepercayaan masyarakat disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat kepercayaan responden

Kepercayaan responden terhadap	Distribusi responden (%)		
	Percaya	Ragu-ragu	Tidak Percaya
Manfaat hutan rakyat	86.7	13.3	0
Membangun kerja sama	100	0	0
Fungsi aturan tertulis	100	0	0
Fungsi aturan tidak tertulis	100	0	0

Sebanyak 13.3% responden yang menyatakan ragu-ragu beranggapan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh hutan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki pekerjaan lain selain mengelola hutannya seperti wirausaha dan guru honorer, mereka tidak mengelola hutannya secara langsung melainkan dengan bantuan kuli yang merupakan sesama anggota kelompok. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan hutan rakyat yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekologi. Manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari penjualan kayu, dimana yang dulu sulit untuk mendapatkan bibit, sekarang lebih mudah karena terdapat kelompok yang mewadahi bantuan dari pihak eksternal kelompok. Masyarakat sebelum adanya kelompok tani mendapatkan bibit dengan cara anakan alami dan membeli. Jenis bibit yang didapatkan dari bantuan yaitu sengon, manggis, kopi, dan tanaman hortikultur. Manfaat hutan rakyat yang dirasakan masyarakat dapat menguatkan kepercayaan anggota yang lain untuk menjaga kelestarian hutan rakyat yang diperkuat oleh tingkat kepercayaan bahwa anggota yang lain dapat bekerja sama dalam menjaga kelestarian

hutan rakyat. Kemampuan kerja sama antar warga dan kelompok tani yang tinggi dilandasi oleh nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang melekat pada masing-masing individu petani sehingga dapat menguatkan hubungan sosialnya.

Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan kelompok tani yaitu nilai luhur. Nilai luhur yang dikembangkan adalah kebersamaan, saling mengawasi dan membantu, serta musyawarah. Kebersamaan mengajarkan bahwa semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saling mengawasi dan membantu merupakan nilai yang sangat berguna dalam pengelolaan hutan rakyat karena dapat mengurangi masalah-masalah seperti pencurian kayu dan kecemburuan antar anggota. Hal ini dapat dilihat dari pembagian yang dilakukan oleh kelompok tani, sebelum bantuan dibagikan kepada anggota, mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan siapa saja yang ingin menanam bibit tersebut. Kemampuan dan keinginan untuk menanam bibit merupakan hal yang penting agar bibit yang telah dibagikan tetap dirawat dan hasilnya tidak terbuang percuma.

Petani pengelola hutan rakyat percaya bahwa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis dapat berfungsi untuk menjaga keberlanjutan kelestarian hutan rakyat. Seluruh responden percaya terhadap aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur

kelestarian pengelolaan hutannya. Aturan tertulis berupa AD/ART Kelompok Tani Taruna Tani. Begitu juga terhadap aturan tidak tertulis berupa kesepakatan dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan, hal tersebut dapat berfungsi untuk menjaga kelestarian hutan rakyat.

Tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan sangatlah penting untuk menjalankan sebuah aturan yang mengatur dalam sebuah kelembagaan. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Tingkat pemahaman, dan kepatuhan responden terhadap aturan

Pemahaman dan Kepatuhan Responden	Distribusi responden (%)		
	Paham/ Patuh	Cukup Paham/Patuh	Tidak Paham/Patuh
Pemahaman terhadap aturan tertulis dan tidak tertulis	20	80	0
Kepatuhan responden	100	0	0
Pandangan responden terhadap anggota masyarakat yang lain	100	0	0

Sebagian besar responden menyatakan cukup paham karena mereka tidak mengetahui atau hafal tentang aturan yang tercantum pada AD/ART dalam kelompok tani. Mereka hanya percaya bahwa aturan yang telah dibuat memiliki tujuan yang baik untuk pengelolaan hutan rakyat, sehingga mereka mematuhi aturan tersebut. Hal

ini dapat dilihat dari tidak adanya anggota yang pernah terkena sanksi dan seluruh responden menyatakan bahwa mereka patuh terhadap aturan yang ada terutama peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis kelompok tani tertuang dalam AD/ART Kelompok Tani Taruna Tani yang salah satunya disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Hak dan kewajiban anggota Kelompok Tani Taruna Tani

No	Hak	Kewajiban
1	Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberi suara dalam Rapat Anggota.	Mematuhi AD/ART serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
2	Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus.	Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok.
3	Mengemukakan pendapat atau saran baik diminta atau tidak diminta.	Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan.
4	Memfaatkan kelompok dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.	
5	Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan kelompok menurut ketentuan AD/ART.	

Sumber: Lampiran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani Taruna Tani

Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat

Pengelolaan hutan rakyat pada Desa Karyasari umumnya menggunakan jarak tanam sebesar 4m x 4m dan 10m x 10m. Tanaman kayu yang ditanam oleh kelompok tani mayoritas adalah sengon laut, selain itu masyarakat juga menanam tanaman pangan seperti kacang panjang, jagung, manggis, pisang, kopi, dan singkong. Sistem pengelolaan hutan rakyat pada dasarnya bertitik tolak pada tiga sub sistem yang saling berkaitan yaitu sub sistem produksi, sub sistem pengolahan hasil dan sub sistem pemasaran (Attar 1998). Sedangkan Hardjanto (2003) dalam usaha kayu rakyat, menambahkan sub sistem kelembagaan juga penting yaitu adanya lembaga yang melaksanakan dan mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat baik lembaga formal maupun nonformal.

Sub Sistem Produksi

Pengelolaan hutan rakyat perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama pada subsistem

produksi, karena semakin baik pengelolaan dalam sub sistem produksi maka akan mendapatkan hasil panen yang baik. Sub sistem produksi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan (Lembaga Penelitian IPB 1990).

1. Penanaman

Masyarakat melakukan kegiatan persiapan lahan sebelum penanaman dengan pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam dan pengajiran. Seluruh responden melakukan kegiatan persiapan lahan sebelum penanaman untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal. Pembersihan lahan dilakukan sebelum penanaman yang bertujuan agar tidak ada tanaman pengganggu di sekitar penanaman dan untuk memudahkan kegiatan pemeliharaan. Pemilihan jenis berdasarkan pada jenis yang mampu tumbuh di Desa Karyasari serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bibit diperoleh secara swadaya masyarakat dan pola subsidi ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Cara mendapatkan bibit

Cara memperoleh bibit	Jumlah responden	Persentase (%)
Tumbuh alami	17	56.7
Membeli	7	23.3
Bantuan Pemerintah	30	100

Perolehan bibit secara swadaya masyarakat diperoleh dengan membeli dan memanfaatkan tanaman alami sedangkan perolehan bibit pola subsidi merupakan bantuan pemerintah melalui program pembibitan yang dikelola secara swadaya oleh kelompok tani.

Sejak adanya program pembibitan dan penghijauan seluruh responden menyatakan mendapatkan bibit melalui bantuan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa tahun terakhir masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan bibit melalui kelompok tani.

2. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan dilakukan petani agar tanaman dapat tumbuh maksimal dan terbebas dari serangan hama penyakit serta bentuk gangguan lainnya. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petani disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Kegiatan pemeliharaan pada Kelompok Tani Taruna Tani

Kegiatan	Jumlah responden	Persentase (%)
Penyulaman	10	33.3
Penyiangan	30	100
Pemangkasan	30	100
Pemupukan	30	100
Penjarangan	24	80

Tingkat pengelolaan hutan pada kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di Desa Karyasari yaitu 82.7%, hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di Desa Karyasari sudah insentif. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petani berdasarkan arahan teknis dari pengurus kelompok tani dan penyuluhan pemeliharaan tanaman. Data pada Tabel 5 menunjukkan tidak semua responden melakukan kegiatan penyulaman dan penjarangan. Hal ini disebabkan karena untuk kegiatan penyulaman, kelompok tani tidak memiliki bibit untuk mengganti bibit yang mati, sedangkan untuk kegiatan penjarangan, petani ragu-ragu karena dapat mengurangi jumlah pohon yang akan diproduksi. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa seluruh responden melakukan kegiatan penyiangan. Penyiangan dilakukan sebagai upaya pembersihan lahan dan pembuatan sekat bakar agar saat musim kemarau tidak terjadi kebakaran hutan. Kegiatan pemangkasan bertujuan agar tegakan pohon mendapatkan sinar matahari secara merata untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Petani yang melakukan kegiatan pemangkasan memanfaatkan ranting pohon hasil pemangkasan sebagai kayu bakar dan juga memanfaatkan daun-daunnya untuk pakan ternak. Kegiatan pemupukan dilakukan oleh seluruh responden untuk mendapatkan tegakan yang tumbuh dan

berkembang dengan baik. Pupuk yang digunakan oleh kelompok tani adalah pupuk kandang dan pupuk kimia (pupuk Ponska).

3. Pemanenan

Kegiatan pemanenan menggunakan sistem silvikultur sistem tebang butuh. Masyarakat melakukan penebangan apabila memiliki kebutuhan mendesak, salah satunya biaya sekolah, biaya hajatan dan juga kebutuhan sendiri untuk perbaikan rumah. Ketentuan yang berlaku dikalangan masyarakat terkait kegiatan pemanenan yaitu pohon ditebang apabila sudah memiliki diameter lebih dari 16 cm dan pada umumnya diameter tersebut didapatkan pada kayu berumur kurang lebih 3 tahun.

Kelompok Tani Taruna Tani menyerahkan kegiatan penebangan, pembagian batang dan pengangkutan kepada pembeli. Kegiatan penebangan dan pembagian batang dilakukan secara manual dengan gergaji tangan untuk diameter kecil sedangkan untuk diameter berkisar 35-40 cm pembeli biasanya menggunakan *chainsaw*. Apabila kayu yang ditebang digunakan sendiri, kegiatan penebangan dan pengangkutan juga dilakukan sendiri dan menggunakan gergaji tangan. Kayu yang ditebang dimanfaatkan oleh petani untuk perbaikan dan membangun rumah.

Kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh petani ataupun pembeli sudah melalui perencanaan yang baik yaitu penentuan arah

rabah, pembuatan takik rebah dan takik balas. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemanenan tidak menimpa pohon lain, menimpa bangunan yang mengakibatkan kerusakan, ataupun kecelakaan kerja.

Sub Sistem Pengolahan Hasil

Pengolahan hasil merupakan proses untuk menghasilkan bentuk produk akhir dari pohon yang ditebang baik dijual ataupun dipakai sendiri oleh petani. Seluruh responden menyatakan tidak melakukan pengolahan hasil dalam pengelolaan hutan rakyat.

SubSistem Pemasaran

Sistem pemasaran yang dilakukan petani sejauh ini masih dijual pada pembeli lokal untuk memenuhi kebutuhan lokal saja. Pemasaran hasil hutannya dilakukan dengan cara pemasaran kayu berdiri. Pembeli atau pengepul mendatangi langsung lokasi dan melakukan seluruh kegiatan penebangan. Pembeli dan petani berunding untuk menentukan kesepakatan harga yang disepakati bersama. Pembayaran dilakukan secara kontan, pembeli menanggung seluruh biaya penebangan dan mengurus seluruh administrasinya sehingga petani tidak mengeluarkan biaya apapun.

Pemasaran dalam bentuk kayu berdiri dibeli dengan dua cara yaitu borongan dan perpohon. Pembeli dan petani berunding dalam menentukan harga dan disesuaikan dengan jarak pohon yang akan ditebang. Semakin jauh jarak pohon yang akan ditebang terhadap kendaraan yang akan mengangkut kayu, harga kayu akan semakin kecil.

Kendala dan Upaya

Kelompok tani sampai saat ini masih terkendala pada aspek pemeliharaan tanaman. Terdapat hama ulat uter pada pohon sengon yang

mereka tanam. Ulat uter yang berada pada pohon yang muda masih dapat diatasi dengan mengupas bagian kulit yang terdapat ulat uter, tetapi untuk pohon sengon yang sudah dewasa dan memiliki tinggi yang sulit dijangkau, mereka terpaksa untuk menebang pohon tersebut atau menunggu kayu tanpa melakukan tindakan apapun. Sampai saat ini mereka masih sulit untuk menemukan solusi untuk mencegah ulat uter pada pohon sengon mereka. Beberapa anggota kelompok tani pernah mengalami pencurian kayu. Pencurian kayu tidak sering terjadi karena menurut responden orang yang mencuri kayu hanya membutuhkannya untuk kayu bakar. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kayu yang dicuri dan kayu yang dicuri biasanya kayu yang sudah mulai kering. Kelompok tani telah melakukan pertemuan dengan tokoh desa, dari hasil pertemuan didapatkan yang mencuri kayu bukan dari anggota atau pengurus kelompok tani, kemungkinan besar adalah masyarakat Desa Karyasari yang membutuhkan kayu untuk dijadikan kayu bakar.

Hingga saat ini kelompok masih terkendala pada aspek pemasaran. Hal ini terjadi karena belum adanya pelaksanaan tugas yang jelas dari masing-masing seksi yang ada pada kelompok tani khususnya seksi pemasaran, selain itu karena sistem penebangan yang dilakukan merupakan sistem tebang butuh, masyarakat lebih memilih melakukan penebangan secara individu. Hal ini berpengaruh pada kurangnya posisi tawar menawar petani pada pembeli sehingga petani tidak memiliki harga pasaran yang jelas.

Hubungan Kelembagaan dengan Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Hubungan kelembagaan terhadap pengelolaan hutan rakyat ditunjukkan oleh peran kelembagaan terhadap pengelolaan hutan rakyat Desa

Karyasari. Pada aspek struktural, pengurus kelompok tani berperan untuk memberikan instruksi terkait pengelolaan lahan hutan rakyat, informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelompok tani, dan motivasi. Hal tersebut dapat berpengaruh kepada pengelolaan lahan hutan rakyat yang menjadi lebih baik oleh masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat berdasarkan norma/aturan lokal yang berkembang dimasyarakat dan menjadi cara, kebiasaan dan adat istiadat dalam mengelola hutannya. Hal ini membuat masyarakat Desa Karyasari untuk tetap menjaga dan melestarikan lahan yang ada di hutan rakyat. Kelompok juga membangun kerja sama antar anggota untuk menjaga kelestarian hutannya yang ditunjukkan dengan adanya solidaritas anggota berupa nilai-nilai kebersamaan dan saling membantu sesama anggota kelompok seperti melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan gotong royong.

Pada sub sistem produksi kelompok Taruna Tani berperan memberikan berbagai kemudahan, seperti bantuan dan alat pertanian. Selain itu, kelompok tani juga berperan untuk memfasilitasi kegiatan peningkatan pengelolaan hutan rakyat yang bekerja sama dengan penyuluh kehutanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hardjanto (2017) bahwa kelembagaan usaha hutan rakyat sangat penting dalam pengembangan usaha hutan rakyat agar dapat mewujudkan kelestarian hutan dan kelestarian usaha.

REFERENSI

Arief, S. 2016. Kelembagaan Hutan Rakyat Kasus di *Forest Management Unit (FMU)* Karsa Lestari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Kehutanan. Institiut

Pertanian Bogor: Bogor.

Attar, M. 1998. Hutan Rakyat: Kontribusi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani dan Perannya Dalam Perekonomian Desa, Kasus di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di dalam: Suharjo D, editor. *Hutan Rakyat di Jawa*. Bogor (ID): Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (PM3KM) IPB.

Awang, S., Suryanto, S., Eko, B.W. 2007. Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Banyumili-PKHR: Yogyakarta.

Djuwadi. 2002. Pengusahaan Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Hardjanto. 2003. Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa. Disertasi. Institiut Pertanian Bogor: Bogor.

Hardjanto. 2017. Pengelolaan Hutan Rakyat. PT Penerbit IPB Press: Bogor

Hindra, B. 2006. Potensi dan kelembagaan Hutan Rakyat. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 "Kontribusi Hutan Rakyat dalam Kestinambungan Industri Kehutanan". Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan: Bogor.

Lembaga Penelitian IPB

Ngadiono. 2004. Pengelolaan Hutan Indonesia. Yayasan Adi Sanggoro: Bogor.

Ohorella, S., Suharjo, D., Ichwandi, I. 2011. Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Rumahkay di Reram Bagian Barat, Maluku. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 17(2),49-55.

- Pranaji, T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian: Bogor.
- Rianse, U., Abdi. 2009. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi. Alfabeta: Bandung.
- Sudjana, D. 2001. Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif. Falah Production: Bandung.
- Syahyuti. 2006. Tiga Puluh Konsep Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. PT Bina Rena Pariwara: Jakarta.
- Widiyanti, S. 2009. Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung). Skripsi. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor: Bogor.